

2.4. Hukum

2.4.1. Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan di sepanjang Triwulan III - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Ringkasan Perkara Hukum

Triwulan I – 2024	
Perdata	Pidana
6	0

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di Triwulan III – 2024 atau telah dinyatakan selesai di Triwulan III – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rincian Perkara Hukum

No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
1	523 K/Pdt.Sus-KPPU/ 2024	1. PT PP (Persero) Tbk 2. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Sudah Selesai
2	363/Pdt.G/2023 PN Jkt.Utr	1. PT Korindo Konstruksi	1. PT Sastra Energia International d/h PT Satyamisra Surya Perkasa 2. PT Asuransi Tri Pakarta 3. SK Ecoplant Co., Ltd. 4. Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. 5. PT Rekayasa Industri 6. PT PP (Persero) Tbk	Masih Berlangsung
3	638/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst	1. PT Sastra Energia International d/h PT Satyamisra Surya Perkasa	1. Refinery Development Master Plan Balikpapan Joint Operation 2. SK Ecoplant Co., Ltd. 3. Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. 4. PT Rekayasa Industri 5. PT PP (Persero) Tbk 6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, cq KCP Mandiri Jakarta Angkasa 7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, cq KCP Mid Plaza	Masih Berlangsung

No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
			8. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cq KCP Sepanjang	
4	19/Pdt.G/2023/PN Tkn	1. Ahmadi 2. Abadi 3. H. Usman. M 4. Ali Mustafa 5. Mulyono Faiman	1. PT PLN (Persero) 2. PT PP (Persero) Tbk	Masih Berlangsung
5	504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim	1. PT Mataram Manunggal Pratama	1. PT PP (Persero) Tbk 2. PT PP Properti, Tbk 3. PT Graha Prima Realtindo 4. Toto Hariyadi 5. Ezwin 6. PT Osa Putra Batom 7. PT Asigraphi	Sudah Selesai
6	181/Pdt.G/2024/PN Kpg	1. CV Jaya Raya Lestari	1. PT PP (Persero) Tbk	Sudah Selesai

2.4.2. Sanksi Administrasi

Sepanjang Triwulan III - 2024, terdapat 1 (satu) sanksi administrasi, PT PP (Persero) Tbk dihukum untuk membayar denda sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha dan diperintahkan untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda jika mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Namun, pada tanggal 31 Juli 2024, Mahkamah Agung telah memutuskan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT PP (Persero) Tbk dengan membatalkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022 *jo.* 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang memuat sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas.

2.4.3. Perkara Perpajakan

Pada Triwulan III - 2024 tidak terdapat perkara perpajakan yang melibatkan PT PP (Persero) Tbk.

2.4.4. Perkara Lingkungan

Pada Triwulan III - 2024 tidak terdapat perkara lingkungan yang melibatkan PT PP (Persero) Tbk.

2.4.5. Perkara Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Pada Triwulan III - 2024 tidak terdapat perkara ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang melibatkan PT PP (Persero) Tbk.